

**EFEKTIVITAS PELATIHAN DALAM PENINGKATAN
KEMAMPUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN BAGI
APARATUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH**

**(Studi Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH :

TIRAINA PUTRI SIREGAR

178520047



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/22

**EFEKTIVITAS PELATIHAN DALAM PENINGKATAN
KEMAMPUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN BAGI
APARATUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH**

**(Studi Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH :

TIRAINA PUTRI SIREGAR

178520047



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 8/6/22


Access From (repository.uma.ac.id)8/6/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TIRAINA PUTRI SIREGAR
NPM : 178520047
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PELATIHAN DALAM
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYUSUNAN
KEBIJAKAN BAGI APARATUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA (STUDI PADA KANTOR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menyetujui
Komisi Pembimbing


Drs. Bahrum Jamil, MAP
Pembimbing I


Walid Musafa, S. Sos, M. IP
Pembimbing II

Mengetahui:


Drs. H. Sismanto, MA
Dekan Fakultas Isipol


Nina Anggela, S. Sos, M. Si
Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 16 SEPTEMBER 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksipencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, September 2021



Tiraina Putri Siregar
178520047

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiraina Putri Siregar
NPM : 178520047
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Efektivitas Pelatihan dalam Peningkatan Kemampuan Penyusunan kebijakan Bagi Aparatur Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, September 2021
METERAI
TEMPEL
SERAJAH 178520047
Tiraina Putri Siregar
178520047

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELATIHAN DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN BAGI APARATUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(studi pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah provinsi
Sumatera Utara)

Pada dasarnya pelatihan merupakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap seseorang aparatur agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional, karena diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, khususnya untuk aparatur dalam meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan kebijakan yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektivitas penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan kebijakan di BPKAD Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang meliputi penghambat dalam penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan kebijakan yang efektif di BPKAD Provinsi Sumatera Utara melalui pelatihan-pelatihan yang ada di BPKAD Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional aparatur dalam penyusunan kebijakan. Adapun fenomena dalam penelitian ini yaitu kurangnya minat aparatur dalam mengikuti pelatihan, kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelatihan untuk peningkatan kemampuan yang efektif aparatur dalam penyusunan kebijakan di BPKAD provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dinyatakan belum efektif dalam penyusunan kebijakan hal ini dikarenakan belum terpenuhinya seluruh indikator yang mampu menjunjung terhadap efektivitas suatu pelatihan yakni : kurangnya sarana dan prasarana dalam pelatihan, kurangnya minat aparatur dalam mengikuti pelatihan ini, dan kurangnya disiplin aparatur dalam kegiatan pelatihan yang terdapat pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

**Kata kunci : Efektivitas, pelatihan peningkatan kemampuan aparatur ,
penyusunan kebijakan**

ABSTRACT

Effectiveness of training in increasing the ability to formulate policies for financial management apparatus to regional assets

(Study at the office of the regional financial and asset management agency in the province of North Sumatra)

Exercise is to improve the knowledge, skills and attitudes of an apparatus so that they can carry out their duties and work well. Improving the quality of human resources in general is the key to the success of national development because it is directed at increasing the ability and having a productive work ethic, being skilled, creative, professionally disciplined, especially for the apparatus in improving the ability of the apparatus in formulating effective policies. The purpose of this training is to describe and analyze how effective the training is to increase the ability of the apparatus in formulating policies BPKAD Province of North Sumatera and identifying and analyzing what factors include obstacles in the implementation of training to increase the capacity of the apparatus in formulating effective policies at BPKAD in the Province of North Sumatera. Through training in BPKAD, North Sumatera Province in an effort to improve the professional ability of the apparatus in policy making. As for the phenomena is this training, namely the lack of interest in the apparatus in participating in the training, the lack of facilities and infrastructure to support training for effective capacity building of the apparatus in policy making at BPKAD, North Sumatera Province. This type of research is using a descriptive qualitative method. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the research conducted by the researcher are declared to be not effective in formulating policies. This is because all indicators that are capable of upholding the effectiveness of a training believe have not been fulfilled : lack of facilities and infrastructure in training, lack of interest of the apparatus in participating in this training activities contained in BPKAD North Sumatera Province.

Keyword : effectiveness, training to increase the capacity of the apparatus policy making

RIWAYAT HIDUP

Tiraina Putri Siregar adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 22 Juni 1999, di Medan, Sumatera Utara. Penulis merupakan anak ke 5 dari 7 bersaudara, dari pasangan Raja Lontung Siregar dan Tirlokal Harahap. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Muhammadiyah 30 Medan pada tahun 2005 dan tamat 2011 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Percut sei tuan dan tamat pada tahun 2014. Setelah tamat di SMP penulis melanjutkan ke SMK Sandhy Putra 2 Medan dan tamat pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik dan tamat pada tahun 2021.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk belajar dan berusaha, Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikan skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Pelatihan dalam Peningkatan Kemampuan Penyusunan Kebijakan Bagi Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara)**”.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis mendoakan hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi salah satu syarat kelulusan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Medan Area dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik. Universitas Area Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat tersusun dengan baik karena atas bimbingan, arahan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa hormat, cinta dan syukur kepada semua pihak yang membantu menyelesaikan studi di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yaitu:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yaitu Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA
2. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yaitu Ibu Beby Masitho Batubar, S.Sos, MAP
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yaitu Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, MIP

4. Kepala Program Studi Administrasi Publik, yaitu Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si
5. Wakil Kepala Program Studi Administrasi Publik, yaitu Bapak Beltahmameto Simamora, S.IP, MIP
6. Pembimbing Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yaitu Ibu Marlina Deliana, SAB, M.AB
7. Pembimbing Pertama yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bantuan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu Bapak Drs. Bahrum Jamil, M.AP
8. Pembimbing II yang telah membantu saya untuk memotivasi, mendukung dan membimbing saya dalam menulis hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu Bapak Walid Musthafa, S.Sos, M.IP
9. Sekretaris penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran serta arahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Bapak Fahrul Azmi, S.Sos, MAP
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Negara dan Dosen Program Studi lain yang telah memberikan bimbingan, semangat dan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
11. Seluruh staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat dibutuhkan penulis.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini memenuhi kriteria kelulusan dan bermanfaat serta menambah ilmu bagi pembaca.

Medan, September 2021

Penulis

Tiraina Putri Siregar



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ivi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
BAB 1 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Teori Administrasi Publik	7
2.2 Konsep Efektivitas	12
2.2.1 Ukuran Efektivitas	13
2.3 Konsep Pelatihan	15
2.3.1 Komponen-Komponen Pelatihan	16
2.3.3 Tujuan Pelatihan	17
2.3.4 Jenis –jenis Pelatihan	18
2.3.5 Sasaran Pelatihan	18
2.3.6 Syarat-syarat Pelatihan	18
2.4 Pengertian <i>Good Governance</i>	19
2.4.1 Asas-Asas <i>Good Governance</i>	20
2.4.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	22

2.5	Pengertian Kebijakan	24
2.5.1	Tahap-tahap kebijakan.....	27
2.52	Faktor yang Mepengerahin Pembuatan kebijakan.....	29
2.5.3	Proses Penyusunan Kebijakan Publik.....	31
2.6	Pengertian Aparatur	32
2.7	Kerangka Pemikiran	33
	Gambar 2.1. kerangka Pemikiran Penelitian	35
2.8	Penelitian Terdahulu	36
	Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	37
	BAB III.....	38
	METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1	Jenis Penelitian	38
3.2	Lokasi dan Waktu penelitian	38
3.3	Informan Penelitian	39
3.3.1	Informan Kunci	40
3.3.2	Infroman Utama	40
3.3.3	Infroman Tambahan	40
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4.1	Observasi.....	40
3.4.2	Wawancara Mendalam	40
3.4.3	Dokumentasi.....	41
3.5	Metode Analisis Data	41
a.	Redukasi Data	41
b.	Penyajian Data	41
c.	Penarikan Kesimpulan.....	41
	BAB IV	42
4.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi Bina Keuangan BPKAD SUMUT	47
4.2	Pembahasa	49
4.2.1	Efektivitas Pelatihan dalam Peningkatan Kemampuan Penyusunan Provinsi Sumatera Utara	58
4.2.2	Fator Penghambat dan faktor pendukung dalam upaya Provinsi Sumatera Utara.	69

BAB V	69
KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran	70



DAFTAR PUSTAKA.....	72
Gambar 2. Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara	75
Gambar 3. Foto bersama dengan Informan Kunci.....	76
Gambar 4. Foto bersama dengan Informan Kunci.....	76
Gambar 5. Foto bersama dengan Informan Utama	77
Gambar 5. Foto bersama dengan Informan Tambahan	77



DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Waktu Penelitian	39
---	-----------



DAFTAR BAGAN

Gambar 2.1. kerangka Pemikiran Penelitian	35
--	-----------



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan kemampuan perangkat daerah menjadi persoalan penting bagi negara-negara berkembang karena disana sedang bertumbuh harapan-harapan akan disentralisasi pelayanan publik yang efektif serta hasil-hasil pembangunan yang berkelanjutan, harapan-harapan tersebut beimplikasi pada munculnya sejumlah peran baru pemerintah daerah berkenak dengan program-program domestik di era sebelumnya, pemerintah daerah di negara berkembang lebih merupakan eksekutor dari kebijakan-kebijakan yang di adopsi oleh pemerintah pusat. Sekarang pemerintah memiliki lima peran domestik baru yaitu menjadi penyedia layanan, fasilitator anatar pemerintah dengan nonpemerintah, mediator di antara entinis dalam komunikasi serta jaringan-jaraingan, dan kualitaas atau revolusi golobalisasi dan informasi.

Adanya beragam peran baru tersebut bagi aparatur untuk memiliki kemampuan yang lebih baik dari sebelumnya, namun demikian samapai sekarang masih sangat sedikit aparatur di negara berkembang yang mempunyai jenis dan level kemampuan yang sesuai untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. Bahawa tanpa adanya pelatihan di sebuah instansi sangat rendah kemampuan seorang aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam peingkatan kemampuan dalam penyusunan kebijakan dengan efektif,

maka aparatur memerlukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang aparatur.

Pelatihan merupakan wahan untuk membangun SDM menuju era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Karena itu, kegiatan pelatihan tidak dapat diabaikan bergitu saja terutama dalam peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan kebijakan. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara mengatur tentang pengembangan kompetensi tersebut melalui pelatihan, pada masa orientasi atau calon aparatur proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral dan kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dalam memperkuat profesionalisme serta kompetensi.

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia maka perlu diadakan pelatihan. Langkah inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumberdaya manusia. Pengembangan sumberdaya manusia merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintahan, agar pengetahuan, kemampuan dan keterampilan aparatur sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan pelatihan ini, maka diharapkan dapat memperbaiki dan mengatasi kekuangan dalam melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik.

Dalam rangka efektivitas peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan kebijakan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara untuk itu dilaksanakan pelatihan agar kebijakan yang di jalankan di BPKAD berjalan dengan efektif dengan berjalanya sebuah kebijakan secara efektif maka berjalan juga tugas pokok dan

fungsinya seorang aparatur secara efektif agar mencapai kebijakan-kebijakan yang sesuai. Aparatur pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara memerlukan pelatihan agar dapat menghasilkan penyusunan kebijakan secara efektif dalam peningkatan kemampuan aparatur yang ada di BPKAD Provinsi Sumatera Utara, karena salah satu tugas pokok instansi tersebut adalah perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sangat jelas bahwa pelatihan ini pada hakikatnya memberikan dampak positif yang sangat besar bagi kemajuan suatu instansi, akan tetapi ada pelatihan yang berjalan dengan lancar dalam artian manfaat besarnya terhadap aparatur dapat dirasakan akan tetapi tak jarang dijumpai adanya ketidakberhasilan dari pelatihan tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas sekilas penulis memberikan pandangan, permasalahan yang sering terjadi ialah aparatur di BPKAD Provinsi Sumatera Utara tidak secara serius mengikuti pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan kebijakan, mereka mengikuti kegiatan ini hanya sebagai kewajiban sehingga setelah kegiatan pelatihan selesai maka tidak ada perubahan yang signifikan yang bisa mereka aplikasikan dalam peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan kebijakan di BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Selain itu pelatihan juga belum mampu memberikan kesadaran kepada para aparatur dalam melaksanakan tugas pokoknya dan fungsinya sehingga aparatur yang telah mengikuti pelatihan belum memberikan kontribusi dalam peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan kebijakan yang efektif.

Bedasarkan pada uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “ **Efektivitas pelatihan dalam peningkatan kemampuan penyusunan kebjakan bagi aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Sumatera Utara (studi pada kantor badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi sumatera Utara)**”

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam sebuah penenelitian, termasuk dalam penelitian yang penulis lakukan merupakan suatu upaya untuk melihat permasalahan secara umum, dimana tahap tersebut dilaksanakan sebagai upaya guna mampu mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai atau dengan kata lain perumusan masalah dengan upaya untuk lebih fokusnya yang ada. Sebagaimana yang dikemukakan oleh sugiyono (2015:2280 bahwa “rumusan masalah merupakn pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan sebuah data di lapangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pelatihan di BPKAD Provinsi Sumatera Utara efektif dalam peningkatan kemampuan penyusunan kebijakan bagi aparatur ?
2. Apa saja yang menajdi fotor-faktor penghambat dalam upaya peningkatan kemampuan pensusunan kebijakan bagi aparatur di BPKAD Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas dari pelatihan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan kebijakan di BPKAD Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor Kendal/penghambat dalam upaya peningkatan kemampuan penyusunan kebijakan bagi aparatur di BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik, pemberdayaan masyarakat, dan Efektivitas

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

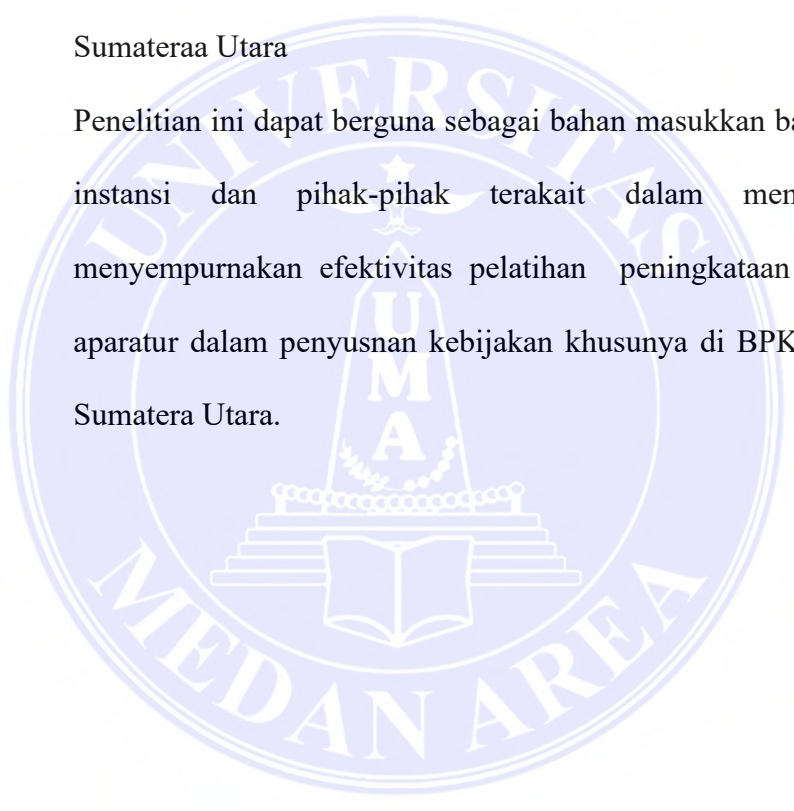
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menggunakan ilmu dan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan membandingkannya pada fakta di lapangan.

b. Bagi civitas akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan pertimbangan dan perbandingan bagi kalangan akademisi, mengenai efektivitas kerja aparatur sipil negara serta menjadi acuan pada peneliti selanjutnya yang sejenis.

c. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi instansi-instansi dan pihak-pihak terkait dalam membuat dan menyempurnakan efektivitas pelatihan peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan kebijakan khususnya di BPKAD Provinsi Sumatera Utara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Administrasi Publik

Menurut Dwight Wald dalam Syafiie dan Welasari (2017:51) administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahannya. Terkait dengan pemerintahan Geogr J.Goedon menjelaskan tentang administrasi negara yaitu ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara. Welasari (2017:50)

Dalam buku Johannes Basuki (2018:11) Secara umum ilmu administrasi publik dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama dari sekelompok manusia berdasarkan nilai-nilai pelayanan, rasionalitas yang tinggi, efektivitas, dan efisiensi terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari rumusan sederhana ini dapat dimaknai bahwa di dalamnya mengandung konsep-konsep utama administrasi, yakni konsep pertama, proses yang bermakna bahwa kegiatan administrasi publik adalah kegiatan yang terus-menerus dilakukan atau penyelenggara negara harus selalu hadir mendampingi masyarakat (publik) yang dilayani; harus selalu hadir mendampingi masyarakat (publik) yang dilayani; kedua, sumber daya manusia yang di dalamnya birokrasinya; ketiga, konsep tujuan yang hendak dicapai yang telah ditentukan sebelumnya yaitu oleh pemilik organisasi (dalam negara dengan sering kali demokratis maka tujuan ditentukan oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan rakyat.

Administrasi berdasarkan etimologis bersumber dari bahasa latin yang terdiri dari ad + ministrare, yang secara operasional berarti melayani, membantu dan memenuhi. Dalam bahasa asalnya terbentuk kata benda administration dan kata sifat administrativus. Sedangkan dalam bahasa Inggris menjadi administration dan dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi. (Hadari, 1994: 23) Administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata Administratie (bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, kegiatan menyusun keteranganketerangan secara sistematis, dan pencatatan-pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bilamana akan dipergunakan lagi, baik secara terpisah-pisah maupun sebagai keseluruhan yang tidak terpisahkan, dan segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan (clerical work).
2. Administrasi dalam arti luas berasal dari kata administration (bahasa Inggris), yaitu:
 - a. Menurut H. A. Simon mengemukakan bahwa “Administration as the activities of groups cooperating to accomplish common goals” (administrasi adalah kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama).

- b. Menurut Luther Gulick mengemukakan bahwa “Administration has to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives” (administrasi adalah yang berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan)
- c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai: Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan - Kegiatan kantor dan tata usaha.

Administrasi publik di Indonesia lebih dikenal dengan istilah administrasi Negara. Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi sebagai salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. White (dalam Waluyo, 2007: 35) menyatakan bahwa administrasi publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara. Sedangkan menurut Kasim (1994: 8) menyatakan bahwa administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.

Administrasi publik dianggap sebagai organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. Dimana tujuan kenegaraan tersebut meliputi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang-barang publik dan memberikan pelayanan publik (Kristiadi, 1994:23). Sedangkan Siagian (dalam Waluyo, 2007: 37) mengatakan bahwa administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Proses administrasi sebagai proses politik juga dikemukakan oleh Dimock (1996: 40) merupakan bagian dari proses politik suatu bangsa. Hal ini bisa dipahami, karena berdasarkan perkembangan paradigma administrasi, administrasi publik berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Suradinata, 1993: 33).

Perkembangan administrasi sebagai disiplin ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang, dimana pemahamannya dilihat dari paradigma. Perkembangan paradigma tersebut menggambarkan adanya perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan dalam tujuan, teori dan metodologi serta nilai-nilai yang mendasari. Henry (1988) mengemukakan lima paradigma administrasi publik, yaitu :

1. Paradigma Dikotomi Antara Politik dan Administrasi Terdapat dua fungsi pokok pemerintah yaitu politik dan administrasi. Maka permasalahannya adalah dimana administrasi Negara berada, sehingga dibedakan dengan

jelas antara administrasi dan politik. Namun, administrasi Negara sebenarnya harus berada pada birokrasi pemerintahan.

2. Prinsip-prinsip Administrasi Negara Dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Maka prinsipnya adalah administrasi Negara dapat diterapkan dimana saja walaupun berbeda kebudayaan, lingkungan, visi dan lainnya.
3. Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik Merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi Negara dan ilmu politik. Dan pada fase ini administrasi Negara telah berkembang sebagai bagian dari ilmu politik.
4. Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi Perkembangannya diawali ketidaksenangan bahwa ilmu administrasi dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu politik. Usaha pengembangannya bertujuan untuk mempercepat proses mencari alternative paradigma ilmu administrasi.
5. Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara Pada proses ini administrasi Negara telah merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan dan ekonomi politik. (Pasolong, 2012: 36-38)

2.2 Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif memiliki arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) ataupun dapat membawa hasil. Efektivitas merupakan keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang di capai , sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagian, 2001:24)

Menurut Sondang P. Siagian (2001:4) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukan sejauh mana perencanaan dapat dicapai. Semakin banyak yang akan di rencanakan dan semakin banyak yang akan dicapai, maka semakin efektif pula suatu kegiatan atau program terssebut, sehingga kata efektivitas bisa diartikan sebagai tingkat ataupun tolak ukur keberhasilan yang

dapat dicapai dari suatu cara atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari rencana-rencana yang telah ditetapkan.

2.2.1 Ukuran Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas suatu program bukanlah hal yang mudah, karena tingkat efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai dan menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah diciptakan. Jika usaha atau hasil tindakan yang dilakukan tidak mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, maka hal tersebut bisa dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria yang bisa digunakan untuk pencapaian efektif yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2001 : 77), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksud agar karyawan/staf dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang teratah dan tujuan organisasi dapat tercapai
2. Kejelasan strategis pencapaian tujuan, telah diketahuin bahwa straregi adalah yang diikutin dalam berbagai upaya untuk mencapai sasaran agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan dalam oraganisasi.
3. Proses analisi dalam perumusan kebijkana yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan aratinya kebijakan harus mampu bertanggung jawab atas tujuan-tujuan dengan usah pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijalankan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pendoman bertindak dan bekerja.
5. Perencanaan yang matang pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satunya indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimana pun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasaran, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut pada sistem pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan menurut Richard M. Steers (2005 : 53) dalam bukunya Efektivitas Organisasi menyatakan teori mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, oleh karena itu, agar pencapaian tujuan semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian tujuan terdiri dari beberapa alior yaitu kurang waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

2. Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyatakan proses sosialisasi.
3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk ini digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari beberapa definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu disampaikan bahwa peneliti akan menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (2005 : 53), yaitu: Pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kemampuan penyusunan kebijakan bagi aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi Sumatera Utara.

2.3 Konsep Pelatihan

Pengertian pelatihan menurut Simamora (1997) adalah proses sistematis perubahan perilaku para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan organisasional. Dalam pelatihan diciptakan suatu lingkungan di mana para karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Pelatihan biasanya terfokus pada penyediaan bagi para karyawan

keahlian-keahlian khusus atau membantu mereka mengoreksi kelemahan-kelemahan dalam kinerja mereka.

Menurut Gomes (1995), pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki *performance* pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Deskripsi yang lebih komprehensif dari proses pelatihan, menurut Armstrong (1992), adalah konsep pelatihan terencana (*planned training*). Pelatihan terencana merupakan intervensi yang cermat yang dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja pekerjaan (Kenney dan Reid 1990).

2.3.1 Komponen-Komponen Pelatihan

Komponen-Komponen Pelatihan Program pelatihan meliputi unsur-unsur, menurut Hamalik (2000) sebagai berikut: 1. Peserta latihan Penetapan calon peserta latihan erat kaitannya dengan keberhasilan proses pelatihan, yang pada gilirannya turut menentukan efektivitas pekerjaan. Karena itu, perlu dilakukan seleksi yang teliti untuk memperoleh peserta yang baik, berdasarkan kriteria.

1. peserta pelatihan penetapan calon peserta latihan erat kaitannya dengan keberhasilan proses pelatihan, yang pada gilirannya turut menentukan efektivitas pekerjaan. Karena itu perlu dilakukan seleksi yang teliti untuk memperoleh peserta yang baik , berdasarkan kriteria.
2. Pelatihan memegang peran yang penting terhadap kelancaran dan keberhasilan program pelatihan. Itu sebabnya perlu dipilih pelatihan yang alih, yang berkulifikasi professional.

3. Lamanya pelatihan lamanya masa pelatihan berdasarkan perimbangan tentang jumlah dan mutu kemampuan belajar para peserta dan media pengajaran.
4. Bahan latihan sebaiknya disiapkan secara tertulis agar mudah dipelajari oleh para peserta.
5. Bentuk pelatihan yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan.

2.3.3 Tujuan Pelatihan

Tujuan utama pelatihan pada intinya dapat dikelompokkan kedalam tujuh bidang menurut Simamora (1998) yaitu :

1. Memperbaiki kinerja
2. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi.
3. Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten dalam pekerjaan.
4. Membantu memecahkan permasalahan operasional.
5. Mempersiapkan karyawan untuk promosi.
6. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi.
7. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi.

2.3.4 Jenis –jenis Pelatihan

Setiap pendidikan dan pelatihan yang akan diadakan harus selalu memperhatikan

sejauh mana pola pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dapat menjamin proses belajar yang efektif . menurut Widodo (2015:86), jenis-jenis pelatihan yang biasa dilakukan dalam organisasi antara lain:

- a. Pelatihan dalam kerja (*on the job training*)
- b. Mengang (*apprentinticeship*)
- c. Pelatihan di luar kerja (*of-the-job training*)
- d. Pelatihan di tempat mirip sesungguhnya (*vestibule training*)
- e. Simulasi kerja(*job simulation*)

2.3.5 Sasaran Pelatihan

Sebelum mengenal pelatihan kita harus terlebih dahulu mengetahui beberapa sasaran pelatihan. Menurut Sustrisno (2009:69).Sasaran pelatihan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produktivitas kerja
- b. Meningkatkan mutu kerja
- c. Meningkatkan ketepatan dalam perencanaan sumber daya manusia
- d. Meningkatkan moral kerja
- e. Menunjang pertumbuhan pribadi

2.3.6 Syarat-syarat Pelatihan

Menurut hasibuan (2016:74), pelatihan atau instruktur yang baik hendaknya memiliki syarat sebagai berikut :

a. *Teaching Skills*

Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan untuk mendidik atau mengajarkan, membimbing, memberikan petunjuk, dan membagi pengetahuannya kepada peserta pengembangan.

b. *Communications Skills*

Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan secara efektif.

c. *Personality Skills*

Seorang pelatih harus memiliki kewibawaan terhadap peserta pengembangan.

d. *Social Skills*

Seorang pelatih harus mempunyai kemahiran teknis, kecakapan teoritis, dan tangkap dalam mengambil suatu keputusan.

f. *Technical Competent*

Seorang pelatih harus berkemampuan teknis, kecakapan teoritis, dalam tangkas dalam mengambil suatu keputusan.

g. *Stabilitas emosi*

Seorang pelatih tidak boleh berperasangka jelek terhadap anak didiknya, tidak boleh cepat marah, mempunyai sifat kebabakan, keterbukaan. Tidak pendendam serta memberikan nilai yang objektif.

2.4 Pengertian *Good Governance*

pengertian *Good Governance* artinya pemerintahan yang baik yaitu tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati HAM, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, secara sadar dan sistematis membangun

fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter, dan menghormati keragaman termasuk etnis, agama, suku, dan budaya lokal (Nurcholis, 2007:300). Sedangkan menurut Keraf dan Akadun mengartikan *good governance* sebagai adanya dan berfungsi baiknya beberapa perangkat kelembagaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat bisa dijamin dengan baik (Kartika dkk, 2012:11).

Sementara itu World Bank mendefinisikan *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mustafa, 2013:186).

Berdasarkan beberapa pendapat para tokoh terkait pengertian *good governanc* khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat sehingga sehingga sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat yang dibawahnya untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara efektif dan efisien.

2.4.1 Asas-Asas Good Governance

Asas pemerintahan yang baik merupakan bagian yang paling penting karena asas pemerintahan yang baik ini diibaratkan seperti rambu lalu lintas di jalan raya jika tidak ada rambu lalu lintas akan terjadi kekacauan dalam

berkendara sama halnya jika tidak ada asas akan terjadi kekacauan dalam suatu pemerintahan karena asas-asas diperlukan untuk memperlancar hubungan pemerintahan (lalu lintas pemerintahan antara pemerintah dengan yang diperintah atau warga masyarakat). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, ditetapkan tujuh asas penyelenggaraan negara yang baik yaitu:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara,
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang mengutamakan keteraturan, keserasian, dan kesinambungan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara,
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan yang aspiratif, akomodatif dan selektif,
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara,
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara,
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

7. Asas akuntabilitas, yaitu asas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Mustafa, 2013:199)

2.4.2 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Terciptanya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) atau pemerintahan seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat diperlukan suatu sistem yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Keraf dan Akadun mengartikan *good governance* sebagai adanya dan berfungsi baiknya beberapa perangkat kelembagaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat bisa dijamin dengan baik (Kartika dkk, 2012:11). Peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta sebagai pendorong terciptanya perluasan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, sedangkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam aktifitas ekonomi, sosial, dan politik.

Tiga prinsip utama yang mendasari penerapan *good governance* adalah transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dan efektivitas. Ketiga prinsip dasar ini merupakan prinsip yang berlaku secara universal (Adisasmita, 2011:38). Senada dengan hal tersebut Gambir Bhatta mengungkapkan bahwa unsur utama *governance* yaitu akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*) ditambah dengan

kompetensi manajemen (management competence) dan hak-hak asasi manusia (*human right*) (Mustafa 2013:190).

United Development Program (UNDP,1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

1. *Participation*

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki mau pun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, mau pun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

2. Aturan Hukum

(*Rule Of Law*) Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

3. Transparans

harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi

4. Daya Tanggap

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)

5. Berorientasi Konsensus

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan jika dimungkinkan juga dapat

diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan

Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki mau pun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektivitas dan Efisiensi

setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhna melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pblik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*).

9. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut (Mustafa, 2013:190).

2.5 Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu

pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sector swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melanggar suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya, kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis manajemen, finansial, atau administrative untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak secara etimologi, "kebijakan" adalah terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Menurut Holwet dan M. Ramesh (2005:13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.

2. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuat kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000:17) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi saling pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan. Solichin Abdul Wahab (2008:40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

1. Kebijakan harus diberikan dari keputusan.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan atau pun adanya tindakan.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.

8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
10. Kebijakan di rumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar (Suharno,2010:11).Berdasarkan pendapat pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakaukan atau tidak dilakaukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di anantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.5.1 Tahap-tahap kebijakan

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut Wiliam N. Dunn, (2003) dalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat straregis dalam relitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik da prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu behasil mendapatkan suatu sebagai masalah publik, dan

mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah .isu kebijakan (*policy issues*). Sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*).*Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi saling pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut Wiliam N. Dunn (2003), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudahan di cara pemecahan masalah yang baik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam hidup perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun

warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol-simbol tertentu dimana melalui proses ini warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Evaluasi Kebijakan / penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut stimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan biasa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.52 Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan

Menurut Suharno (2010:52-53) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Pembuatan kebijakan dipengaruhi pembuatan kebijakan adalah :

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuatan kebijakan harus memenuhi dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan tekdang amat birokratik, cenderung akan dikutip kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/ kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk dikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut di pandang memuaskan.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh pembuat keputusan/kebijakan banya dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan .

4. Adanya pengaruh dari kelompok dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/ kebijakan juga berperan besar.

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan.

Misalnya, orang mengkhawatikan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalah gunakan (Suharno, 2010:52-53).

2.5.3 Proses Penyusunan Kebijakan Publik

Lazimnya, proses kebijakan meliputi tiga fase penting yang dapat dipahami sebagai fase yang penuh dengan perspektif konflik kepentingan antara para pihak atau aktor yang terlibat yaitu fase perumusan masalah, fase penyusunan agenda dan fase pengajuan kebijakan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertajam analisis sekalaigus membatasi lingkungan pembahasan proses transformasional masalah kebijakan yang ada pada tiga titik perumusan masalah tersebut .

Menurut Indara Muda (2019:6) proses penyusunan agenda kebijaksanaan (*Agenda setting*) adalah suatu proses yang meliputi rangkaian tindakan dan strategi (*actions and strategies*) di dalam mana isu-isu tertentu menjadi pusat perhatian bagi masyarakat (*publik attention*), *agenda setting* dapat memberikan gambaran tentang proses politik yang mengarahkan kepada perpindahan isu-isu tertentu kepada tingkat kebijakan yang lebih tinggi. Dalam hal ini masalah kebijakan memainkan peranan yang sangat penting dalam menetapkan masalah tertentu terhadap agenda kebijakan publik.

Selanjutnya, agenda kebijakan merupakan sebuah daftar permasalahan atau isu yang mendapatkan perhatian serius karena berbagai alasan sehingga diproses menjadi kebijakan. Proses maksudnya isi ke dalam agenda kebijakan cenderung lebih bersifat politis dari pada rasional. Menurut Rakhmat (2009:135), terdapat empat faktor yang berpengaruh pada proses penyusunan agenda kebijakan, yaitu, perkembangan sistem pemerintahan yang demokratis, sikap pemerintahan dalam proses penyusunan agenda kebijakan, partisipasi

masayarakat, persoalan dimana aktor pemerintah daerah. Terkait dengan agenda isu dapat berupa daftar personalan dimana aktor pemerintahan dana non pemerintahan memeberikan perhataian yang serius pada titik waktu teretentu. Karena itu penyusunana sebuah agenda berarti mempersempit seperangkat isu yang akan diberikan perhataian atau difokuskan oleh aktor kebijakan.

2.6 Pengertian Aparatur

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Aparatur Negara” didefinisikan sebagai “alat kelengkapan Negara”, terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Manajemen menitikberatkan pada kepegawaian Negara dikenal dengan “profesi pegawai” yang bekerja dipemerintahan yang melaksanakan “Public Civil Service”.¹ Kepegawaian Negara di Indonesia dikenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dahulu dikenal dengan sebutan PAMONG PROJO atau PANGREH PROJO. Dengan adanya Undang- Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), kepegawaian Negara yang disebut dengan istilah “Aparatur Sipil Negara” (ASN), mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pembahasan tentang ASN merupakan bagian dari manajemen keegawaian Negara dibawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (passal 4 ayat 1 UUD NRI 1945). ASN adalah penyelenggara Negara yang terdapat dalam semua lini pemerintahan. Pelaksana

kegiatan administrasi dilaksanakan oleh ASN sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah. Menurut Paul Pigors, tujuan pengelolaan kepegawaian Negara adalah : 1). Agar penggunaan dan kinerjanya bisa efektif, tidak boros dan menghasilkan kerja yang sesuai yang dibutuhkan; 2). Pengembangan karirnya dijamin secara jelas sesuai dengan kompetensi diri dan kompetensi jabatan; 3). Kesejahteraan hidupnya dijamin

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alat berpikir peneliti dalam penelitian, untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka pemikiran sebagai berikut :

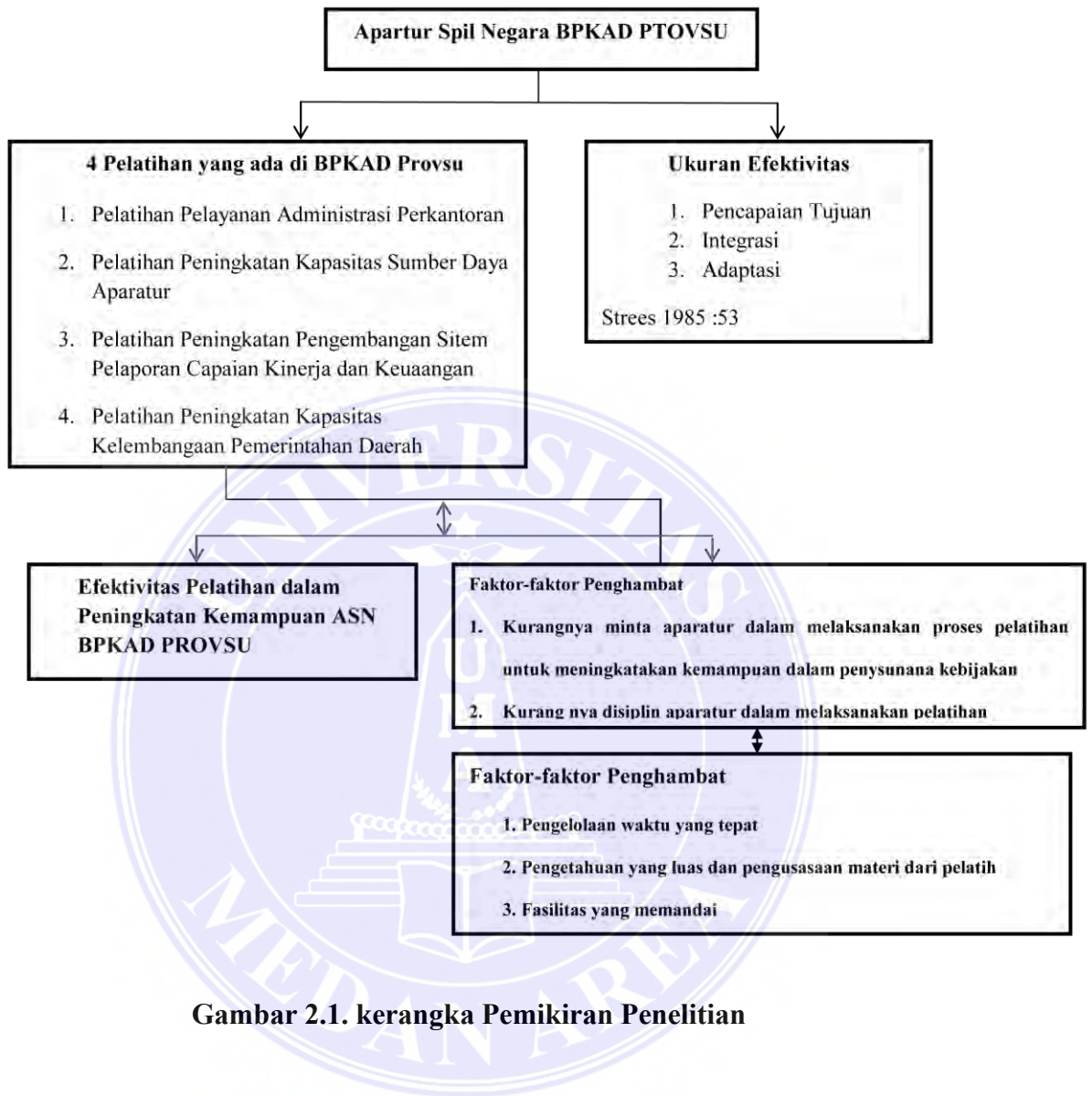
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “Efektivitas Pelatihan kemampuan Penyusunan Kebijakan Bagi Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara”. Peneliti mendeskripsikan pelatihan yang dijalankan dalam peningkatan kemampuan dalam penyusunan kebijakan bagi aparatu dan faktor-faktor penghambat dalam peningkatan kemampuan penyusunan kebijakan bagi aparatur di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi sumatera utara .

Pencapaian tujuan tersebut perlu tahap-tahap proaktif lembaga dan institusi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kemampuan aparatur dalam penyusunan kebijakan dengan pelatihan.

Hingga saat ini, aparatur masih belum sepenuhnya mampu untuk menyusun suatu kebijakan. Banyak kebijakan yang mereka buat tidak sesuai dengan

keinginan masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan Negara abdi masyarakat dituntut untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi umum pemerintahan dan pembangunan. Selain itu juga aparatur harus lebih mampu melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan serta tanggap terhadap pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat.





Gambar 2.1. kerangka Pemikiran Penelitian

2.8 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Peningkatan kemampuan penyusunan kebijakan aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten kaloka timur	Tien Novitati, Syamsul Alam, La Ode Mustafa (2017)	Membahas mengenai bagaimana kemampuan aparat, penyusunan kebijakan, pengelola keuangan daerah	<p>Hasil ini memerhatikan salah satu kelemahan utama yang dihadapi BPKAD kabupaten kaloka timur adalah tingkat pendidikan pegawai.</p> <p>Hasil penelitian menunjukan bahwa secara formal ada pembagian tugas dalam manajemen operasional pekerjaan di BPKAD kabupaten kolaka timur</p> <p>Pemilikan kemampuan politik bagi aparatur BPKAD kabupaten kolaka timur</p>

2	Efektivitas pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil dalam meningkatkan kinerja aparatur	Fachry H. Samad, Masye Pengkey, Sonny Rompas	Bagaimana proses Melatih Aparatur Kinerja aparatur	Hasil penelitian yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan PNS diarahkan pada upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur sehingga dapat melaksanakan tugas dan jabatan secara professional sesuai kebutuhan organisasi atau instansi guna mewujudkan kinerja yang optimal.
---	---	--	--	---

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif menurut Boghdan dan Taylor dalam Gunawan (2016: 82) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada setting dan individu secara utuh. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengadopsi pandangan positif yang didasarkan pada asumsi bahwa fenomena sosial dikonstruksikan sebagai interpretasi oleh individu (subjek), dan interpretasi tersebut cenderung bersifat variabel dan situasional. Sugiyono (2008: 15) menambahkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positif yang digunakan untuk mengkaji kondisi suatu benda alamiah dimana peneliti adalah petunjuk dan kuncinya. Pendekatan penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian sosial. Penelitian ini menggunakan data yang dinyatakan secara lisan dan kualifikasinya bersifat teoritis dimana pengumpulan datanya tidak berdasarkan statistik, tetapi dengan pola pikir tertentu dengan meletakkan hukum-hukum logika.

3.2 Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, pada Januari 2021 – Febuary 0221.

No.	Uraian Kegiatan	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021	April 2021	Mie 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agustus 2021	September 2021
1	Seminar Proposal									
2	Data/ Penelitian									
3	Seminar Hasil									
4	Penyusunan Skripsi									
5	Bimbingan Skripsi									
6	Perbaikan Skripsi									
7	Sidang Meja Hijau									

3.1 Tabel Waktu Penelitian

3.3 Informan Penelitian

3.3.1 Informan Kunci

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui secara pokok data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Drs.Abdul Syukur Tambahan Kepala Subbagian Umum dan Kepengawaian BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

3.3.2 Infroman Utama

Infroman utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam hal yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak H.Hendri Aguslan, SE,M.Si selaku Kasubagian Program, Akuntabilitas dan Infromasi Publik BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

3.3.3 Infroman Tambahan

Infroman tambahan yaitu mereka yang mengetahui informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam hal yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Bapak Irwanda Pulungan, S.S.os selaku sub bagian Keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan terlebih dahulu secara langsung terhadap sesuatu yang akan diteliti, melalui teknik ini dapat diketahui data sebagai bukti untuk menjawab permasalahan.

3.4.2 Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan pertemuan dan orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, Sugiyono (2013:231)

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi bisa diartikan mencari dan mengumpulkan data mengetahui hal-hal atau variable yang berupa buku, surat, transkrip, notulen, majalah, rapat agenda, gambar, dan lain sebagainya.

3.5 Metode Analisis Data

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono, (2018:247) Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data biasanya dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *Flowchat* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narasi. Dengan menyediakan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

c. Penarikan Kesimpulan

kebijakan sudah efektif karena secara keseluruhan semuanya berjalan dengan baik dan akurat dan pemanfaatan waktu yang sangat efektif dalam proses pelatihan. Efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan kebijakan di BPKAD PROVSU sudah efektif, ini bisa dilihat dari ketepatan waktu dilihat dari ketepatan waktu penyelesaian tugas serta peningkatan kemampuan dalam penyusunan kebijakan yang dimiliki aparatur di BPKAD setelah mengikuti pelatihan maka BPKAD melakukan uji coba agar melihat apakah sudah berjalan proses penyusunan kebijakan yang efektif. Setelah dilakukan evaluasi pelatihan dalam meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan kebijakan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan banyak aparatur yang sudah mengalami perubahan dalam meningkatkan kemampuan seorang aparatur BPKAD dalam penyusunan kebijakan dan perubahan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai aparatur di BPKAD. Hal itu terjadi karena setelah mengikuti pelatihan tersebut, terjadi peningkatan kompetensi baik dari segi pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku peserta pelatihan secara umum telah menjadi lebih efektif, selain itu kesadaran dalam diri aparatur untuk menyelesaikan pekerjaannya jauh lebih baik dan kinerjanya meningkat dari sebelumnya mengikuti pelatihan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan harus lebih mendorong aparatur nya dalam pelaksanaan pelatihan agar meningatakan minat aparatur di BPKAD dalam peningkatkan kemampuan dalam penyusunan kebijakan dan maupun tugas pokok dan fungsinya di BPKAD dan pimpinan lebih mengevaluasi disiplin aparatur dalam melaaksanakan pelatihan agar berjalanya pelatihan dalam peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan kebijakan yang efektif dan berjalanya tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
2. Perlunya pempinan meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelatihan agara aparatur meinat dalam pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan dalam penyusunan kebijakan agara aparatur tidak bosan dan jenuh dalam pelatihan tersebut maka meningkatnya sarana dan prasarana dalam pelatihan tersebut maka berjalan lah pelatihan yang efektif dalam peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan kebijakan di BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Steers, Richard M. 2005. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muda Indra. (2017). *Analisis Kebijakan*. Medan Persada.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Prenanda Media Group
- Gunawan, Imam, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Gunawan, Imam, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hartomo, 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam*. Bandung : Alfabeta.
- Herdiansyah, Haris, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hartomo, 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam*. Bandung : Alfabeta.

Karya Ilmiah :

- Woodhatch, T., Casazza, A., Lucas, B. and Weter, F., 2011. *Capacity to Results: . Case Stories on Capacity Development and Sustainable Results Rwanda : . Learning Network On Capacity Development*.
- Shah, A. and Shah, S., (editor), 2006. *Local Governance In Developing . Countries. Washington, DC: The International Bank For Reconstruction . and Development*.
- Garfias, F., 2015. *Elite Competition and State: Development: Theory and Evidence . From Post-Revolutionary Mexico*.
- Rahmedi Yonis (2014). *Menilai Efektivitas Pelaksanaan Diklat Aparatur Melalui Evaluasi Pasca Diklat*. Buletin Badan Diklat Prov. Sumbar.

- A.S,Kartika.Putri . 2019. *Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Terhadap Kualitas Pelayanan Publik*. UNIVERSITAS . PROF.DR.MOESTOPO, Jakarta
- Noviati , (2015). *Peningkatan Kemampuan penyusunan kebijakan bagi Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaloka Timur*. Volume 8, No.1
- Graha, N.A. 2005. *Pengaruh Pelatihan Terhadap Kemampuan Karyawan dan Dampaknya Terhadap kinerja karyawan* . (Studi Pada Karyawan PT. Gatra Mapan Malang). Malang . Jurnal MODERNISASI, Volume 1, Nomor 2,
- Febriani.P.W. 2017. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pelayanan Pajak Bumi Bagunan di Desa Pagerejo Kecamatan Kartek Kabupaten wonosobo 2016*. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, Semarang
- Saragih.D.N.U.2018. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan*. UNIVERSITAS MEDAN AREA, Medan
- Laniari. M.2015. *PelaksanaanPengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (AND) Dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori di Kecamatan Bandara Huluan Kabupaten Simalungun*. UNIVERSITAS MEDAN AREA, Medan

Undang-Undang :

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi pegarai melalui pendidikan dan pelatihan.

Internet :

<https://bpkad.sumutprov.go.id>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aparatur_Sipil_Negara .



Lampiran Dokumentasi



Gambar 1. Gedung BPKAD Provinsi Sumatera Utara



Gambar 2. Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara



Gambar 3. Foto bersama dengan Informan Kunci



Gambar 4. Foto bersama dengan Informan Kunci



Gambar 5. Foto bersama dengan Informan Utama



Gambar 5. Foto bersama dengan Informan Tambahan



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolang Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setia Budi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 092 /FIS.2/01.10/II/2021
Lamp : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

17 Februari 2021

Yth,
Ka. Kesbangpol

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Tiraina Putri Siregar
N P M : 178520047
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan judul Skripsi **"Efektivitas Pelatihan dalam Peningkatan Kemampuan Penyusunan Kebijakan Bagi Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi Kasus pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara)"**

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Heri Kusmanto, MA

CC : File,-

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480
Fax. (061)4153148 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070-365/BKB.P/II/2021

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

2. Menimbang : Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 092/FIS.2/01.10/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Perihal Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

a. Nama : Tiraina Putri Siregar
b. Alamat : Medan
c. Pekerjaan : Mahasiswa
d. Nip./Nim/KTP : 178520047
e. Judul : Efektivitas Pelatihan dalam Peningkatan Kemampuan Penyusunan Kebijakan Bagi Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
f. Lokasi/Daerah : Kantor BPKAD Provsu
g. Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
h. Peserta : Sendiri
i. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
a. Untuk pengawasan surat izin yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol Provsu

4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir b tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku

5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan 18 Februari 2021
An.KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA
KABID PEMBINAAN KEWASPADAAN NASIONAL
KASUBBID KEWASPADAAN DINI, ANALISIS, EVALUASI, INFORMASI DAN
KEBIJAKAN STRATEGIS


PUTRA LANDRI SITEPU,S.STP, MSI
PEMBINA
NIP. 198207122000121003

Tembusan

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (Sebagai laporan)
2. Ka. BPKAD Provsu
3. Ka. Balitbang Provsu
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
5. Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Gedung Bank Sumut Lantai 7

MEDAN

Medan, 25 Februari 2021

Nomor : 071/360/SEKR
Lampiran :
Perihal : Telah Selesai Penelitian.

Kepada Yth :
Dekan Fak. Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Medan Area
di -

Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070-365/BKB.P/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, Perihal Rekomendasi Penelitian dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 092/FIS.2/01.10/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, tentang Rekomendasi Penelitian atas nama :

Nama : Tiraina Putri Siregar
NIM : 178520047
Program Studi : Admintrasi Publik
Judul : Efektivitas Pelatihan dalam Peningkatan Kemampuan Penyusunan Kebijakan bagi Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dengan ini kami menyatakan bahwasanya Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian, selanjutnya hasil penelitian tersebut dikirim kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pjh. SEKRETARIS,



H. HENRI AGUSLAN, SE, M.Si
PEMBINA
NIP: 19690817 199603 1 005